



**PENERAPAN DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DI BARESKRIM MABES POLRI
(Diskresi Dalam Penanganan Unjuk Rasa)**

TESIS

ELLA ANGELIA

1520922073

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**



**PENERAPAN DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DI BARESKRIM MABES POLRI
(Diskresi Dalam Penanganan Unjuk Rasa)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

ELLA ANGELIA

1520922073

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Ella Angelia
NRP : 1520922073
Tanggal : 25 Januari 2018

Jakarta, 25 Januari 2018

Yang Menyatakan,


Ella Angelia

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ella Angelia
NRP : 1520922073
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan
kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas
Royalti Non-eksklusif (Non Ekslusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah
saya yang berjudul : **PENERAPAN DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA DI BARESKRIM MABES POLRI** (Diskresi Dalam Penanganan
Unjuk Rasa)

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif
ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan
mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Januari 2018

Yang menyatakan



Ella Angelia

...

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Ella Angelia

NRP : 1520922073

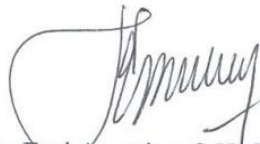
Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **PENERAPAN DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK**

PIDANA DI BARESKRIM MABES POLRI

(Diskresi Dalam Penanganan Unjuk Rasa)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



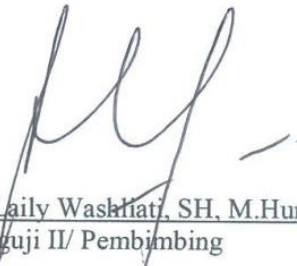
Dr. Erni Agustina. S.H., Sp.N

Ketua Penguji



Prof. Dr. Jean Neltje Saly, SH, MH, APU

Penguji I / Pembimbing



Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum

Penguji II/ Pembimbing



Dwi Desi May, S.H., M.H.

Dekan



Dr. Erni Agustina. S.H., Sp.N

Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 8 Pebruari 2018

**DI BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI MARKAS
BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

ELLA ANGELIA

ABSTRAK

Kepolisian memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya, salah satu kewenangan yang diberikan ialah kewenangan Diskresi, lahirnya kewenangan Diskresi pada Kepolisian didasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi : 1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui pengaturan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana. 2. Menggambarkan dan menganalisis penerapan diskresi dalam Lingkungan Mabes Polri 3. Mengetahui akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana. Dengan metode penelitian normatif yuridis ketahu bahwa Pengaturan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana berlandaskan pada pokok-pokok Pembukaan, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. pelaksanaan diskresi pada Sat Reskrim Di Mabes Polri dilakukan oleh penyidik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada Sistem Peradilan Pidana, dalam melakukan diskresi penyidik tidak dapat secara keseluruhan bentuk perkara dapat dilakukan diskresi, akan tetapi perkara yang dapat dilakukan tindakan diskresi oleh penyidik tergolong suatu delik aduan serta tindak pidana ringan yang diantaranya adalah Pasal 302, 352, 364, 373, 379, 482, 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 3. Akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana yaitu adanya alasan penghapus pidana yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana.

Kata Kunci : Diskresi, Penyidikan, Pidana

**IMPLEMENTATION OF CRIMINAL INVESTIGATION DISCRETION
IN NATIONAL POLICE CRIMINAL INVESTIGATION
UNIT NATIONAL POLICE HEADQUARTERS**

ELLA ANGELIA

ABSTRACT

Police have authority in performing their duties, one of the authority given is the authority of Discretion, the birth of the authority of Discretion on the Police is based on Law no. Law No. 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia, Article 18 Paragraph (1) and (2) which reads: 1) For the public interest of the police officers of the State of the Republic of Indonesia in performing its duties and authorities may act in its own judgment. 2) Implementation of the provisions referred to in paragraph (1) can only be done in a very necessary circumstances with due observance of legislation, as well as the Code of Ethics of the Republican State Police. The purpose of this study is 1. To know the regulation of police discretion in the investigation of crime. 2. Describing and analyzing the application of discretion within the Police Headquarters Environment 3. Knowing the legal consequences of the investigator's discretionary actions against the crime. With the normative juridical research method know that the Police Discretionary Arrangement in the investigation of crime is based on the Principles of Preamble, Body of the 1945 Constitution, Article 7 Paragraph (1) Sub-Paragraph j of Law no. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHP) and Article 16 paragraph (1) letter l and Article 18 paragraph (1) of Law no. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia. 2. the implementation of discretion at criminal detective unit At Police Headquarters conducted by investigators in order to improve the effectiveness and efficiency of the Criminal Justice System, in conducting discretionary investigators can not the whole form of the case can be done discretion, but the case can be done discretion by the investigator classified as a offense And minor criminal offenses, including Articles 302, 352, 364, 373, 379, 482, 315 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). 3. The legal consequence of the investigator's discretionary action against a criminal offense is the existence of a criminal offense that allows a person who commits an actual act to have met the offense formula, not to be punished.

Keywords : Discretion, Investigation, Criminal

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

“PENERAPAN DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BARESKRIM MABES POLRI (Diskresi Dalam Penanganan Unjuk Rasa)”

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU selaku Pembimbing I.
5. Dr.Dra. Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum, Pembimbing II.
6. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – teman di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 25 Januari 2018

Ella Angelia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Perumusan Masalah	6
I.3. Tujuan Penelitian	7
I.4. Manfaat Penelitian.....	7
I.5. Kerangka Teoritis dan Konsep.....	8
I.5.1. Kerangka Teoritis.....	8
I.5.2. Kerangka Konsep	14
I.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
II.1. Diskresi dalam Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	17
II.2. Penyidik Kepolisian: Sub Sistem Peradilan Pidana.....	20
II.3. Letak Diskresi Polisi dalam Penegakan Hukum.....	28
II.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyidik dalam Melakukan Diskresi..	33
II.4.1. Faktor Internal Dalam Mendorong Diskresi Penyidik.....	34
II.4.1.1. Substansi Peraturan Perundang-Undangan	34
II.4.1.2. Instruksi Dari Pimpinan	37
II.4.1.3. Penyidik Sebagai Penegak Hukum	37
II.4.1.4. Situasi Dalam Penyidikan	38
II.4.2. Faktor Eksternal Yang Mendorong Diskresi Penyidik	39
II.4.3. Faktor Penghambat Diskresi Penyidik.....	41

II.4.3.1. Masih Lemahnya Penegakan Hukum	41
II.4.3.2. Kendala Finansial.....	43
II.4.3.3. Oknum Aparat.....	44
II.4.3.4. Pengetahuan Penyidik.....	45
II.4.3.5. Partisipasi Para Pihak.....	47
II.4. Pengaturan Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana	51

BAB III. METODE PENELITIAN..... 66

III.1. Tipe Penelitian.....	66
III.2. Sifat Penelitian.....	67
III.3. Sumber Data	68
III.4. Metode Pengumpul Data	69
III.5. Metode Analisis data	71

BAB IV. PENERAPAN DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI MABES POLRI 74

IV.1. Mabes Polri	74
IV.1.1. Gambaran Umum Mabes Polri.....	74
IV.1.2. Konsep Struktur Organisasi Polri.....	75
IV.2. Mekanisme Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana	80
IV.3. Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa	119
IV.4. Akibat Hukum Dari Tindakan Diskresi Penyidik Terhadap Tindak Pidana	124

BAB V. PENUTUP..... 127

V.1. Simpulan	127
V.2. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP